

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan yang terjadi saat ini di kehidupan manusia dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Perkembangan sistem informasi menjadi kebutuhan yang bersifat krusial dalam instansi maupun lembaga pemerintahan yang potensi manfaatnya secara luas mempermudah pengelolaan serta penyebaran informasi secara cepat dan akurat. Tuntutan akan adanya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan penyelenggaraan dan pengaturan negara yang sejalan dengan kemajuan teknologi karena pengaruh globalisasi. Maka pernyataan tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk membantu pemecahan bermacam bentuk ketidakpastian dan ketidaktahuan yang seringkali menjadi masalah dalam proses pengambilan suatu keputusan (Mado, 2018).

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*) yang partisipatif, efektif, transparansi, dan akuntabel pada seluruh tingkat pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik yang profesional bagi masyarakat. Salah satu bentuk regulasi pelaksanaan *good governance* dalam penyelenggaraan negara adalah mengenai proses pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara, dimana kementerian atau lembaga yang melaksanakan akan mengatur dan mengelola arus kas negara sebagai dasar pengembangan masyarakat. Asas akuntabilitas keuangan negara sebagai salah satu usur pengelolaan negara mewajibkan setiap pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan efektivitas penggunaan dana dalam pelaksanaan setiap program. Oleh karena itu, guna meningkatkan upaya mendukung penerapan akuntabilitas yang sejalan dengan *good governance*, pemerintah Indonesia memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pemerintahan (*electronic government*). Hal tersebut sejalan dengan perkembangan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan yang dilandasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dimana

berisi instruksi kepada aparat pemerintah pusat maupun daerah guna mengembangkan modernisasi teknologi secara global.

Penerapan *E-Government* dalam bidang keuangan negara salah satunya adalah *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS). Penerapan IFMIS dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan proses pengelolaan keuangan negara melalui pemanfaatan aplikasi yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam melakukan suatu pekerjaan dengan efektif dan efisien. Dener (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa konsep IFMIS merupakan rangkaian rencana optimalisasi terpadu untuk menyederhanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan setiap anggaran yang berperan dalam proses pelaporan pendapatan dan belanja negara. Sistem ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan guna memantau pelaksanaan anggaran. Menurut Prabowo (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa permasalahan pengelolaan anggaran dan proses akuntansi merupakan permasalahan yang sering terjadi jika menggunakan sistem manual atau sistem yang terpisah.

Dalam pengelolaan keuangan negara, satuan kerja (Satker) menggunakan aplikasi teknologi informasi yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah berjalan sejak tahun 2005. Sistem aplikasi yang telah digunakan oleh satker antara lain RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) untuk penyusunan usulan anggaran dan kegiatan, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk penyusunan, pengesahan dan revisi DIPA, SPM (Surat Perintah Membayar) untuk pembuatan berkas tagihan, SAS (Sistem Aplikasi Satker) untuk pencairan dana, SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Aktual) untuk pelaporan pelaksanaan anggaran sekaligus alat rekonsiliasi, SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) untuk menatausahakan aset, dan Aplikasi Persediaan untuk Persediaan (Korah et al., 2022). Dari banyaknya sistem aplikasi yang digunakan serta berbagai macam kegunaan membuat Satker merasa terbebani karena harus menguasai semua aplikasi tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mengembangkan sebuah sistem aplikasi baru yang diperuntukkan bagi seluruh satuan kerja (satker) instansi atau lembaga pusat di seluruh Indonesia yang mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di Satker menjadi satu aplikasi sehingga memudahkan Satker dalam mengelola keuangan negara menjadi laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran tanpa membuka banyak aplikasi (Amriani, 2019). Sistem aplikasi tersebut adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau disingkat menjadi SAKTI yang diluncurkan pada akhir tahun 2015, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi atau sistem yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara oleh satker kementerian maupun lembaga. Sistem SAKTI terdiri dari berbagai modul seperti modul administrasi, modul penganggaran, modul komitmen, modul bendahara, modul pembayaran, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, dan modul pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya serta teknologi informasi (PMK No. 171/PMK.05/2021). Fitur utama aplikasi SAKTI antara lain integrasi database, *single entry point*, menerapkan akuntansi berbasis aktual, dan jaminan keamanan data. Sistem ini dikeluarkan untuk mendukung prinsip pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, tertib, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegrasi dan berbasis kinerja.

Aplikasi SAKTI telah mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker dalam pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran (DJPB, 2020). Untuk memastikan bahwa desain, pengembangan, dan pengujian sistem harus diuji dengan benar dan akurat untuk setiap aplikasi yang akan diluncurkan. Ketika aplikasi tersebut digunakan apabila timbul masalah ataupun adanya cacat bawaan (*defect*), sehingga terjadinya masalah tersebut perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan (*update*) hingga kondisinya lebih baik dari sebelumnya (Setiawan, 2020).

Kepuasan pengguna merupakan faktor yang mempengaruhi kesuksesan suatu sistem informasi saat menggunakan suatu sistem aplikasi. Kepuasan tersebut dilihat dari perilaku seseorang karena orang tersebut menggunakan aplikasi yang akan mendapatkan manfaat dan kepuasan dari sistem tersebut. Implementasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 223/PMK.05/2015 tentang pelaksanaan *Piloting* Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi dan PMK-131/PMK.05/2016 Tentang Pelaksanaan *Piloting* SAKTI diawali dengan tahapan uji coba terbatas (*piloting*) mulai tahun 2015. Nasrudin (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan fitur yang terlalu rumit karena terlalu canggih, sinyal internet tidak stabil, belum menampilkan laporan secara utuh, pelatihan pengguna yang minim, komunikasi operator dan admin yang kurang serta permasalahan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sakinah Muslimah (2021) tentang Analisis Penerapan Aplikasi Keuangan Manager Pada Perusahaan Pelayaran (Studi Kasus Pada PT. Nusantara Ika Nararya Semarang) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Manager mampu untuk memenuhi kebutuhan keuangan PT. Nusantara Ika Nararya. Penerapan aplikasi Manager juga mampu menyajikan data informasi keuangan secara cepat, tepat dan akurat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada aplikasi yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan aplikasi SAKTI pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tahun 2022.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto karena Kemenag Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu pengguna aplikasi SAKTI sejak awal tahun 2022 hingga saat ini. Setelah peneliti melakukan observasi singkat dengan pengguna aplikasi SAKTI, kendala yang sering dialami pengguna aplikasi SAKTI di Kemenag Kabupaten Mojokerto pada awal pengaplikasiannya antara lain sinyal yang kurang stabil, tidak ada *back up* aplikasi saat kehilangan data, serta kurangnya SDM karena hanya pegawai tertentu yang memahami aplikasi SAKTI. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih mendalam mengenai penerapan aplikasi SAKTI yang

telah berjalan selama ini. Maka dari latar belakang di atas peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut. **“Analisis Penerapan Sistem Aplikasi keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian dapat menambah wawasan keilmuan dan menambah pemahaman terkait pengelolaan keuangan negara dan penerapan aplikasi SAKTI di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.

2. Manfaat Bagi SDM Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan kontribusi bagi seluruh pegawai yang menjadi pengguna/*user* Aplikasi SAKTI sehingga memudahkan satker dalam pengambilan keputusan terutama pada penerapan aplikasi SAKTI bagi pihak instansi dalam mendukung pengelolaan yang lebih baik menggunakan teknologi modern.

3. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan referensi ilmiah yang berkaitan mengenai penerapan aplikasi SAKTI serta menjadi wadah informasi untuk memperkenalkan mekanisme penerapan aplikasi keuangan dengan memanfaatkan sistem informasi terintegrasi di lingkungan kementerian/lembaga negara.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya terkait penerapan aplikasi SAKTI, sehingga dapat menjadi bahan referensi dan informasi.